

Evaluasi Implementasi *E-Government* Kota Palopo Menggunakan *E-Government Maturity Model*

Aswin Setiawan¹, Muh Fadli Fauzi Sahlan², Supriadi Syam³

^{1,2,3}Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

Jl. Urip Sumoharjo No.Km.4, Sinrijala, Kota Makassar, Indonesia, 90232

Email: ¹aswinit003@gmail.com, ²fadli.fauzi@universitasbosowa.ac.id, ³supriadisiam@universitasbosowa.ac.id

Korespondensi Penulis : supriadisiam@universitasbosowa.ac.id

Submitted: 06/12/2023; Revised: 30/12/2023; Accepted: 30/12/2023

Abstrak– Pengembangan administrasi elektronik merupakan upaya negara untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang terbuka, bersih, dan akuntabel dengan bantuan teknologi informasi. Komitmen terhadap pengembangan *e-Government* dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Governance”. Sebagai bagian dari lembaga pemerintah Indonesia, DPRD Kota Palopo juga mulai menerapkan *e-Government* untuk memaksimalkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahannya. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi sistem manajemen elektronik dengan mengukur tingkat kematangan. Pengukuran tingkat kematangan dilakukan terhadap keterampilan fungsional teknis dengan menggunakan Model Maturitas *e-Government* dan menilai 3 domain dan sub-domain terkait serta 35 indikator yang termasuk dalam sistem *e-Government*. Metode survei yang digunakan adalah metode survei pada E-Government Kota Palopo.

Kata Kunci: *E-Government*; *E-Government Maturity Model*; Pengukuran Tingkat Kematangan

Abstract– The development of electronic administration is a state effort to create an open, clean, and accountable bureaucratic environment with the help of information technology. The commitment to the development of e-Government is described in Presidential Instruction No. 3 Year 2003 on National Policy and Strategy for E-Governance Development. As part of Indonesian government institutions, the Palopo City Council has also begun to implement e-Government to maximize the efficiency of its governance. The purpose of the study was to evaluate the electronic management system by measuring the maturity level. Maturity level measurement was conducted on technical functional skills by using the e-Government Maturity Model and assessing 3 domains and related sub-domains and 35 indicators included in the e-Government system. The survey method used is a survey method on the E-Government of Palopo City.

Keywords: : E-Government;E-Government Maturity Model; Measurement Of Maturity Level

1. PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat yang kuat terhadap pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel mengharuskan pemerintah meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses pelayanan publik. Berbagai infrastruktur TIK dan berbagai aplikasi telah diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan sistem bisnis yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab serta meningkatkan proses bisnis yang cepat, tepat dan akurat.

E-government merupakan penerapan serangkaian proses bisnis melalui pemanfaatan TIK yang memungkinkan kelancaran informasi lintas program dan sektor pemerintah, tujuannya agar pemerintah menjadi lebih tanggap dalam memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat [1]. Keberhasilan penerapan *e-Government* memerlukan perubahan mendasar, mulai dari cara pemerintah beroperasi hingga cara pelayanan pemerintah diberikan kepada masyarakat. Pengenalan *e-Government* merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang terbuka, bersih, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. Inisiatif pelaksanaan *e-government* oleh pemerintah dimulai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika [2]. Undang-undang ini mengarahkan instansi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Selanjutnya pada tahun 2003 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang mana Presiden mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintah di Indonesia untuk menyusun dan merencanakan strategi *e-Government* di lingkungan pemerintahan [3].

Penggunaan TIK di lingkungan pemerintah daerah masih kurang dimanfaatkan karena berbagai hambatan terkait kebijakan, tata kelola, layanan, dan infrastruktur. Beberapa kendala yang dihadapi adalah dari sisi kebijakan, tata kelola, layanan, dan infrastruktur masih menjadi alasan belum maksimalnya pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemanfaatan TIK di lingkungan

pemerintah daerah, seperti penerapan asas-asas pemerintah yang baik (*good governance*), peningkatan kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem keuangan yang baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Penilaian *e-Government* di Indonesia secara berkala dilakukan oleh Departemen Umum *E-Government* di bawah Kementerian Informasi dan Komunikasi melalui Indonesia *E-Government Rating* (PeGI) tingkat provinsi, tidak semua pemerintah provinsi patuh. Menurut penelitian Hernikawati [4], pada tahun 2011 terdapat 26 provinsi yang berpartisipasi, 24 provinsi pada tahun 2012, 21 provinsi pada tahun 2013, 22 provinsi pada tahun 2014, dan 20 provinsi pada tahun 2015. Dari penelitian ini rata-rata hasil Assessment untuk melihat tren berhasil. *E-Government* dinilai “buruk” pada tahun 2012, “baik” pada tahun 2013, “buruk” pada tahun 2014 dan “baik” pada tahun 2015. Dari kondisi ini kita mengetahui bahwa tidak semua pemerintah provinsi ikut penilaian, yang berarti penilaian PeGI bersifat opsional. menjadikan hasil penilaian tidak mewakili kondisi nasional. Lebih lanjut, perkembangan *e-Government* di Indonesia belum menunjukkan tren yang positif, hal ini disebabkan oleh kurangnya kontribusi lembaga penelitian dan pengembangan dalam memberikan berbagai masukan untuk optimalisasi implementasi *e-Government*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi kuantitas, jumlah penelitian terkait *e-Government* masih kurang dalam upaya pengembangan *e-Government* di Indonesia [5].

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tingkat kematangan kemampuan fungsional teknis dengan menggunakan metode *e-Government Maturity Model* (eMM) dan penyesuaian penilaian masing-masing bidang berdasarkan penilaian pada ruang lingkup kerja dan proses lembaga [6]. Metode evaluasi dilakukan terhadap 1 domain dan subdomain yang ada serta 35 indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan proses implementasi pada masing-masing instansi pemerintah [7]. Proses evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi terhadap penerapan *e-Government* pada pemerintah daerah dan memberikan nilai indeks yang menggambarkan tingkat kematangannya.

2. LANDASAN TEORI

A. *E-Government*

E-Government menurut Perserikatan Bangsa Bangsa adalah penggunaan teknologi informasi seperti internet oleh lembaga pemerintah. *E-Government* merupakan bagaimana cara pemerintah untuk mengorganisasikan kegiatan administrasi peraturan dan kerangka kerja yang ditetapkan untuk memberikan layanan kepada publik. Bank Dunia, mendefinisikan *E-Government* sebagai penggunaan teknologi informasi yang memiliki untuk menghubungkan antara warga negara, bisnis dan instansi pemerintah lainnya. Teknologi ini diharapkan dapat melayani berbagai tujuan yang berbeda seperti pelayanan yang lebih baik terhadap warga, terjadinya peningkatan interaksi antara pemerintah dengan bisnis dan industri, kemudahan bagi warga untuk mengakses informasi dan pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien (World Bank, 2012). Manfaat *e-Government* diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan mengurangi kejahatan korupsi melalui informasi yang transparan dan bertanggung jawab.

B. *E-Government Maturity Model*

E-Government Maturity Model (E-GMM) adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi kematangan dan efektivitas inisiatif *e-Government* dalam suatu negara atau organisasi. Hal ini memberikan pendekatan terstruktur untuk memahami dan mengukur kemajuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan pemerintah, melibatkan masyarakat, dan meningkatkan proses perjalanan administratif. E-GMM memiliki pendekatan umum yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a. **Tahap *Emerging***: Pada tahap awal ini, infrastruktur TI dasar sudah terbentuk dan sejumlah layanan *online* mungkin tersedia. Penekanannya adalah pada membangun landasan teknologi yang diperlukan dan meningkatkan kesadaran tentang *e-Government*.
- b. **Peningkatan kehadiran**: Pada tahap ini, lembaga pemerintah membangun kehadiran *online* dan menyediakan informasi dan layanan dasar melalui situs *web*. *Portal e-Government* dikembangkan dan mungkin memperkenalkan beberapa layanan transaksi terbatas.
- c. **Tahap Interaktif**: Pada fase ini, layanan *e-Government* menjadi lebih interaktif dan transaksional. Masyarakat dapat melakukan transaksi *online*, seperti membayar pajak atau memperbarui izin, dan berinteraksi dengan lembaga pemerintah melalui saluran digital. Tingkat ini biasanya melibatkan pengintegrasian sistem *back-end* untuk memungkinkan penyampaian layanan yang lancar.

- d. **Tahap Transaksional:** Tahap transaksional mewakili tingkat kematangan yang lebih tinggi, dimana sejumlah besar layanan pemerintah disediakan secara *online* dan masyarakat dapat melakukan transaksi kompleks secara elektronik. Hal ini melibatkan otomatisasi proses, transaksi *online* yang aman, dan manajemen dokumen elektronik.
- e. **Tahap Integrasi:** Pada tingkat ini, berbagai lembaga dan departemen pemerintah saling terhubung dan berbagi informasi. Fokus dalam tahap integrasi adalah pada layanan yang berpusat pada masyarakat dan integrasi tingkat tinggi di seluruh fungsi administratif. Berbagi data dan interoperabilitas merupakan aspek penting dari langkah ini.
- f. **Tahap Tanpa Batas:** Tahap tanpa batas mewakili tingkat kematangan tertinggi pada *e-Government*. Pada tahap ini, layanan pemerintah sepenuhnya terintegrasi dan disampaikan secara transparan serta personal. Teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, analisis *big data*, dan pembelajaran mesin dimanfaatkan untuk memberikan layanan proaktif dan prediktif kepada masyarakat.

Model kematangan *e-Government* membantu pemerintah dan organisasi menilai kondisi penerapan *e-Government* saat ini, mengidentifikasi kesenjangan dan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan, dan menetapkan tujuan untuk memajukan inisiatif *e-Government*. Hal ini memberikan peta jalan untuk meningkatkan layanan digital, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan meningkatkan efisiensi administrasi.

C. Pengukuran Tingkat Kematangan

Pengukuran kematangan adalah proses menilai sejauh mana suatu organisasi atau proses telah mencapai tingkat kematangan tertentu dalam kerangka atau model tertentu. Indikator kematangan biasanya digunakan dalam pengembangan organisasi, manajemen proyek, manajemen risiko, atau pengembangan proses bisnis. Tingkat kematangan digunakan untuk tujuan standarisasi dan penilaian mandiri untuk pengelolaan TI yang lebih efektif. Pengukuran dapat mengambil pendekatan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan pengendalian, dimulai dengan proses dan pengendalian tingkat lanjut[8]. Tujuan dalam *framework* COBIT adalah untuk mencapai:

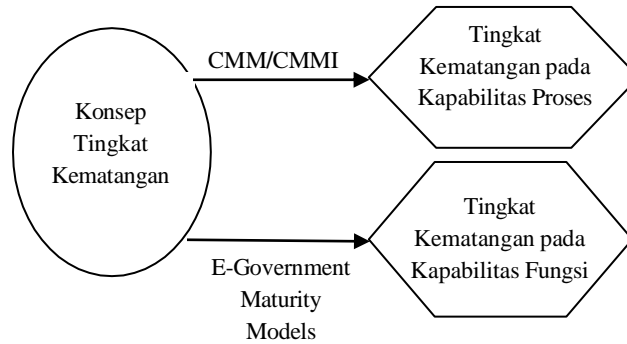
- a. Skala yang sesuai dengan status organisasi saat ini
- b. Petunjuk untuk menentukan arah dan tujuan yang efektif
- c. Alat untuk mengukur kemajuan menuju kesuksesan

Skala pengukuran diberikan dalam langkah-langkah untuk setiap proses TI yang mewakili nilai dari 0 hingga 5. Skala tersebut bergantung pada deskripsi model. Tingkat kematangan kualitas bervariasi dari “tidak tersedia” hingga “dioptimalkan.” Skala kematangan [9] didefinisikan sebagai berikut:

- a. Level 0 (dikatakan tidak ada): tidak ada proses yang jelas. Perusahaan tidak menyadari bahwa ini adalah masalah yang perlu diselidiki.
- b. Level 1 (tahap awal): Ada beberapa bukti bahwa perusahaan memahami bahwa masalahnya ada dan perlu diselidiki, namun tidak ada standarisasi. Namun, ada solusi satu kali yang valid, bergantung pada situasinya. Metode pengelolaan sebagian besar tidak terstruktur.
- c. Level 2 (Iterasi): Proses dikembangkan dalam tahapan di mana banyak orang yang melakukan tugas mengikuti proses serupa. Tidak ada pelatihan formal atau komunikasi mengenai prosedur standar dan tanggung jawab ada pada individu. Ketergantungan pada individu tinggi dan kesalahan sering terjadi.
- d. Tahap 3 (Ditentukan): Proses distandarisasi dan didokumentasikan serta komunikasi terjamin. Pendidikan. Kepatuhan terhadap prosedur adalah wajib. Namun, sedikit penyimpangan memang terjadi. Prosedurnya sederhana namun memformalkan praktik yang ada.
- e. Level 4 (Terkendali dan Terukur): Manajemen memantau dan mengukur kepatuhan terhadap prosedur dan mengambil tindakan ketika proses tersebut tampak tidak efektif. Proses ini terus dikembangkan dan metode yang terbukti diusulkan. Otomatisasi dan alat hanya digunakan secara terbatas dan sporadis.
- f. Level 5 (Optimasi): Proses dirancang untuk mencapai tingkat kinerja yang baik melalui pengembangan berkelanjutan dan model yang matang dengan perusahaan lain. DIA terintegrasi digunakan untuk mengotomatiskan alur kerja dengan menyediakan alat untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, membantu bisnis beradaptasi dengan mudah.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelusuran data *online / Internet Searching* dengan tahapan penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Metode penilaian evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan berdasarkan model kematangan manajemen elektronik (eMM), seperti pada Gambar 1:



Gambar 1. Konsep Tingkat Kematangan

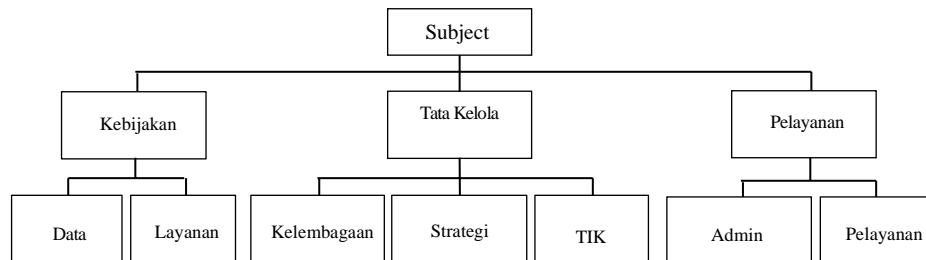
Mengenai tingkat kematangan kapasitas fungsional teknis, indikatornya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis

Tingkat Kematangan	Kapabilitas Fungsi Teknis
1. Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah
2. Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi & layanan
4. Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain
5. Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

1) Tahap Perencanaan

Tahap ini adalah mempersiapkan instrumen evaluasi dan melakukan tahapan pra- evaluasi. Gambar 2 menunjukkan instrumen yang akan dilakukan dievaluasi.



Gambar 2. Instrumen Evaluasi SPBE

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data dan evaluasi dengan cara mengevaluasi website Pemerintah Kota Palopo yang sudah ada. Tahap ini memberikan penilaian kematangan berdasarkan konten website Pemerintah Kota Palopo. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang terdapat pada konten website Kota Palopo.

3) Tahap Pelaporan

Langkah ini meliputi sintesis hasil evaluasi dari nilai indeks SPBE yang diperoleh seperti pada Tabel 2, kemudian memberikan saran perbaikan.

Tabel 2. Nilai Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penilaian yang dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan menggunakan *e-Government Maturity Model* (eGMM) meliputi 1 domain, subdomain terkait, 7 dimensi dan 35 indikator SPBE, maka diperoleh rincian hasil yang diperoleh nilai indeks dari masing-masing bidang, aspek dan Indikatornya dapat dilihat pada Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 3. Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE

Domain/ Aspek/ Indikator	Deskripsi	Bobot	Indikator Pengisian	Indeks
Domain 1 : Kebijakan SPBE				0.47
Aspek 1 : Kebijakan Tata Kelola				0.17
Indikator 1	Kebijakan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	1%	2,4	0.02
Indikator 2	Kebijakan Inovasi proses bisnis terintegrasi	1%	2,3	0.02
Indikator 3	Kebijakan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	1%	3,3	0.03
Indikator 4	Kebijakan Anggaran dan Belanja TIK	1%	3	0.03
Indikator 5	Kebijakan Pengoperasian Pusat Data	1%	2,1	0.02
Indikator 6	Kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi	1%	3,2	0.03
Indikator 7	Kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	1%	2,3	0.02
Aspek 2 : Kebijakan Layanan				0.31
Indikator 8	Kebijakan Layanan Naskah Dinas	1%	2,7	0.03
Indikator 9	Kebijakan Layanan Manajemen Kepegawaian	1%	3,2	0.03
Indikator 10	Kebijakan Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	1%	3,3	0.03
Indikator 11	Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan	1%	3,5	0.04
Indikator 12	Kebijakan Layanan Manajemen Kinerja	1%	3,2	0.03
Indikator 13	Kebijakan Layanan Pengadaan	1%	2,9	0.03
Indikator 14	Kebijakan Layanan Pengaduan Publik	1%	2,4	0.02
Indikator 15	Kebijakan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1%	3,2	0.03
Indikator 16	Kebijakan Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	1%	3,3	0.03
Indikator 17	Kebijakan Layanan publik Instansi Pemerintah	1%	3,6	0.04

Tabel 4. Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE

Domain/ Aspek/Indikator	Deskripsi	Bobot	Rata-rata Indikator	Indeks
Domain 2 : Tata Kelola SPBE				0.72
Aspek 3 : Kelembagaan				0.20
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah	4%	2	0.08
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi	4%	3	0.12
Aspek 4 : Strategi dan Perencanaan				0.24
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah	4%	3	0.12
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK	4%	3.1	0.12
Aspek 5 : Teknologi Informasi dan Komunikasi				0.28
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data	4%	3	0.12
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi	4%	2	0.08
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai	4%	2	0.08

Tabel 5. Nilai Indeks Domain Layanan SPBE

Domain/ Aspek/Indikator	Deskripsi	Bobot	Rata-rata Indikator	Indeks
Domain 3 : Layanan SPBE				1.75
Aspek 6 : Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				1.11
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas	5%	3,8	0.19
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian	5%	3,2	0.16
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan	5%	2,8	0.14
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran	5%	3.2	0.16
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan	5%	3.2	0.16
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja	5%	3.2	0.16
Indikator 31	Layanan Pengadaan	5%	2,8	0.14
Aspek 7 : Layanan Publik Berbasis Elektronik				0.64
Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik	5%	3.2	0.10
Indikator 33	Layanan JDIH	5%	3,6	0.18
Indikator 34	Layanan <i>Whistle Blowing System</i>	5%	3,4	0.17
Indikator 35	Layanan Publik Instansi Pemerintah	5%	3,8	0.19

Secara umum, perolehan nilai indeks SPBE pemerintah Kota Palopo untuk 3 domain yakni Kebijakan, Tata Kelola, dan Layanan ditunjukkan pada tabel 6 dan gambar 3.

Tabel 6. Total Nilai Indeks SPBE

Domain	Nilai Indeks
Domain 1: Kebijakan SPBE	0.47
Domain 2: Tata Kelola SPBE	0.72
Domain 3: Layanan SPBE	1.75
Total Nilai Indeks	2.94



Gambar 3. Grafik Total Indeks SPBE

Terkait dengan perolehan nilai indeks SPBE ditinjau dari indikator, aspek dan domainnya, terlihat pada tabel dan grafik yang disajikan menunjukkan hasil yang baik. Tabel 5 menunjukkan bahwa dengan total nilai indeks sebesar 2,94 berarti tingkat kematangan sistem *e-Government* yang dikelola Pemerintah Kota Palopo mendapat predikat “BAIK” mengacu pada nilai indeks jumlah SPBE yang digunakan (Tabel 2).< br>Dengan melakukan pengukuran pada 3 domain tersebut terlihat bahwa domain Pelayanan SPBE mempunyai nilai kematangan tertinggi sebesar 1.75, disusul domain Administrasi SPBE dengan nilai kematangan tertinggi nilai kematangannya sebesar 0.72 dan domain Kebijakan SPBE mempunyai nilai kematangan tertinggi sebesar 0.72. nilai jatuh tempo sebesar 0,47. Dari titik penyelesaian yang dicapai terlihat sangat jelas bahwa beberapa indikator yang sangat perlu ditingkatkan adalah tim manajemen, operasional data center, inovasi proses bisnis yang terintegrasi, integrasi sistem aplikasi dan penggunaan aplikasi umum. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Palopo untuk memperbaiki elemen proses pengelolaan pemerintahan listrik, seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rekomendasi terhadap hasil evaluasi SPBE

No	Rekomendasi Atas Hasil Evaluasi
1.	Praktik-praktik internal yang terkait dengan Kelompok Pengarah SPBE/TIK harus segera ditindaklanjuti dan diterapkan sebagai aturan tim
2.	Kebijakan internal terkait inovasi proses bisnis (<i>integrated workflow</i>) harus segera dirumuskan dan dilaksanakan melalui koordinasi antar otoritas terkait.
3.	Kebijakan internal yang terkait dengan integrasi sistem aplikasi dan aplikasi umum untuk tujuan yang berbeda harus segera ditentukan dengan mempertimbangkan konsep yang tertuang dalam rencana kerja RPJMD dan DPRD Kota Palopo.
4.	Perlunya penguatan manajemen terkait dengan kelompok pimpinan SPBE/TIK
5.	Perlunya penguatan proses bisnis terkait pengenalan SPBE
6.	Manajemen terkait integrasi sistem aplikasi dan penggunaan aplikasi umum untuk tujuan yang berbeda harus diperkuat
7.	Di lingkungan administrasi Kota Palopo, harus dilakukan koordinasi antar instansi dengan masing-masing instansi dan Coding Kota Palopo sesuai perkembangan aplikasi, agar tidak tumpang tindih

5. KESIMPULAN

Evaluasi terhadap sistem *e-Government* Kota Palopo yang dilakukan pada penelitian ini berjalan cukup baik. Penilaian yang dilakukan antara lain mengukur tingkat kematangan kapabilitas fungsional teknis dengan menggunakan *eGovernment Maturity Model* (eMM). Pengukuran dilakukan pada tiga bidang, 7 aspek dan 35 indikator SPBE. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-manajemen* Kota Palopo saat ini berjalan dengan baik, terbukti dari hasil pengukuran kematangan SPBE yang memperoleh total nilai indeks sebesar 2,94 dengan predikat “BAIK”. Saran dalam penelitian ini yaitu, agar Pemerintah Kota Palopo segera memprioritaskan perbaikan sesegera mungkin. Temuan-temuan seperti Pedoman Kelompok Pengarah SPBE, Pedoman Proses Bisnis Terpadu dan Integrasi Sistem Aplikasi harus segera dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penguatan tata kelola dan koordinasi antar organisasi juga harus segera diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fadhlurrahman, R., Saputra, M. C., & Herlambang, A. D. (2018). Evaluasi Penerapan E-government Di Pemerintah Kota Batu Menggunakan Kerangka Kerja Pemingkatan E-government Indonesia (PeGI). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(12), 5977–5982.
- [2] Latif, D. V., Saadah, S., & Arsalan, S. (2019). Evaluasi Penerapan E Government Kota Bandung ditinjau dari Transparansi dan Akuntabilitas. *Journal of Economics Development Issues*, 2(02), 24-31.
- [3] Pratiwi, H. D., Putra, W. H. N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(11), 4116–4124.
- [4] Pratiwi, H. D., Putra, W. H. N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 4(11), 4116-4124.
- [5] A., Sujianto, S., & As' ari, H. Evaluasi Penerapan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. *Journal of Community Research and Service*,7(1),13-23.
- [6] Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo). *Jurnal Penelitian*

Komunikasi Dan Opini Publik, 23(1).

- [7] Masyhur, F. (2017). Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 19(1), 51-62.
- [8] Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2021). E-government: konsep, esensi dan studi kasus. Universitas Mulawarman Repository "REPO-MAN." <http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/15689>.
- [9] Andry, J. F. (2018). Pengukuran Tingkat Kematangan Menggunakan Cobit Pada Perusahaan Jasa Angkutan Truk. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*, 2(1), 155-165.
- [10] Fath-Allah, A., Cheikhi, L., Al-Qutaish, R. E., & Idri, A. (2014). E-government maturity models: A comparative study. *International Journal of Software Engineering & Applications*, 5(3), 71.
- [11] Susanto, T. D. (2015). Measuring e-government implementation program: A case study of Surabaya city, Indonesia. *International Journal of Information Systems and Engineering*, 1(1), 1-8.
- [12] Hernikawati, D. (2013). Kajian Implementasi e-government Tingkat Provinsi di Indonesia. Tugas Akhir: Fasilkom.
- [13] Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan Dan Pendencygunaan Telematika. Sekretariat Kabinet RI .Jakarta.
- [14] Indonesia. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pemerintah Pusat RI .Jakarta.